

asing adalah pemberontakan Boxer (1900), yang dilakukan oleh sejumlah besar patriot muda yang bergabung dalam Masyarakat Tinju Selaras (*The Society of harmonious Fists*), atau yang dikenal juga dengan nama *The Boxers*.

Usaha kebangkitan nasional tersebut mendapatkan hasil yang kontroproduktif dari apa yang diinginkan oleh *The Boxers*. Kekuatan gabungan dari delapan bangsa Eropa berhasil menumpas pemberontakan dan merebut kota Peking.

Walaupun Pemberontakan Boxer gagal, namun semangat revolusi semakin meluas dan mendalam di kalangan para patriot muda Cina. Di tahun 1911, pemberontakan nasional yang dilakukan Dr. Sun Yat-sen dan pengikutnya berhasil menggulingkan Dinasti Manchu. Untuk selanjutnya berdirinya Republik Cina (1 Januari 1912) dengan Dr. Sun Yat-sen yang dikenal sebagai Bapak Cina Modern, sebagai Presiden., namun Dr. Sun Yat-sen pun bisa segera digulingkan oleh Jenderal yang paling berkuasa pada saat itu, Yuan Shih-k'ai, yang membungkam Partai Nasional Sun, Kuomintang (KMT).

Revolusi Soviet (1917) membangkitkan kembali nasionalisme Cina, Uni Soviet mengambil prakarsa untuk menawarkan kepada Sun Yat-sen bantuan yang besar untuk partainya, Kuomintang. Sebagai imbalannya, Sun Yat-sen menerima Partai Cina ke dalam tubuh Kuomintang. Pada tahun 1920-an komunis muncul di Cina, bersamaan dengan bergabungnya Cina dalam Liga Bangsa-Bangsa (sebelum berdirinya PBB, 24 Oktober 1945) pada tanggal 29 Juni 1920. Mengikuti contoh yang diberikan Uni Soviet, Partai Komunis Cina (PKC) didirikan di Shanghai

1921 dan menyusun program partai untuk memimpin kaum buruh dan tani dalam rangka menghancurkan kapitalisme dari dalam.

Untuk menjaga bagian sejarah berkenaan dengan dogma komunis, dimana terdapat permintaan revolusi nasional sebelum revolusi sosialis, penasehat asosiasi Partai Komunis Soviet, yang didominasi oleh birokrat Stalin, mendesak PKC untuk bekerja pada pemerintahan Kuomintang. Birokrat Stalin mengedepankan sebuah teori kasar dari Mensevik tentang revolusi demokratik yang harus dituntaskan dengan aliansi bersama borjuis "demokratik".³ Bulan Juni 1923, PKC menjalin sebuah front persatuan Anti-imperialis dengan KMT untuk melawan para pendekar/panglima perang dan dominasi Imperialis di Cina.

Kematian Sun Yat-sen pada tahun 1925 menandai munculnya seorang tokoh baru yang amat kuat dalam kepemimpinan Kuomintang, yaitu **Chiang kai-shek**.

1. Masa Pemerintahan Republik Nasionalis Cina (Chiang Kai-shek)

Sepeninggal Sun yat-sen, Chiang Kai-shek mengatur dan memimpin kampanye militer untuk menghancurkan kekuasaan para Jenderal dengan tujuan mempersatukan kembali Cina dan menyiapkan untuk pembangunan nasional, yang lebih dikenal dengan Ekspedisi Utara (*Northern Expedition*). Dalam Ekspedisi Utara itu, tentara Chiang menyapu seluruh negeri dan menghancurkan atau mengambil alih kekuasaan para Jenderal. Bergabungnya Mancuria ke dalam

³ http://www.24hrinklater.com/index.php?option=com_content&view=article&id=12

pelukan Republik Nasional Cina pada akhir tahun 1928, merupakan suatu langkah besar dari Chiang Kai-shek dalam usaha penyatuan kembali Cina.

Namun Chiang sendiri tidak menginginkan adanya saingan kekuatan dalam sistem penguasaan tunggal yang ia ciptakan. Di samping usahanya untuk melawan agresi dari luar, yaitu Jepang, Chiang Kai-shek juga berusaha untuk menumpas subversi komunis dari dalam, yaitu Partai Komunis Cina (PKC). Bagi Chiang, agresi Jepang maupun subversi komunis dianggap sebagai penyakit bagi Negara Cina. Hanya saja yang pertama adalah suatu penyakit kulit yang pada waktunya akan dapat disembuhkan, sedangkan yang kedua adalah sebagai penyakit jantung yang sangat mematikan.⁴

Ketika Ekspedisi ke Utara sudah sampai di tepian Sungai yang Zi, dan selanjutnya mempersiapkan diri untuk merebut kota Beijing, Chiang Kai-shek sebagai panglima tertinggi melihat adanya prakarsa dari PKC, yang merupakan bagian dari front persatuan, untuk menguasai kaum buruh dan tani untuk dikerahkan sebagai kekuatan menyita tanah di pedesaan dan melakukan berbagai pemogokan di kota-kota.

Kecurigaan Chiang Kai-shek menjadi kenyataan ketika pasukan buruh dan tani dari PKC mengadakan perebutan kekuasaan terhadap pemerintah daerah kota Nan Chang pada tanggal 1 Agustus 1927, di bawah kepemimpinan kader-kader komunis seperti Zhu De dan Ho Lung. Namun usaha perebutan kekuasaan tersebut mengalami kegagalan karena pasukan Chiang Kai-shek berhasil

⁴ WD. Sulieman, *Seluruh China*, K...

menumpas pemberontakan tersebut dengan keunggulan senjata dan kemampuan bertempur yang dimilikinya atas pasukan buruh dan tani.

Kegagalan yang dialami PKC tersebut tidak dengan mudah mematahkan perjuangan yang dilakukan PKC dalam rangka mewujudkan negara komunis, sebagaimana rencana awal yang telah ditentukan oleh penasehat asosiasi Partai Komunis Soviet. PKC menganggap peristiwa tersebut sebagai kelahiran dari Tentara Merah, sehingga tanggal 1 Agustus dalam bentuk angka 1 dan 8 (dalam huruf Cina) dikukuhkan sebagai lambang Tentara Merah.⁵

Sementara itu di tempat lain, tepatnya di Propinsi Hu Nan di Cina Tengah, Mao Zedong, sebagai kader Komunis Cina, beserta pengikut-pengikutnya melancarkan suatu pemberontakan kaum tani. Namun hasilnya pun tidak jauh berbeda dengan nasib kawan-kawannya di Nan Chang.

Tahun 1928-1929 merupakan masa-masa keemasan bagi pemerintahan Chiang Kai-shek, yaitu karena: *pertama*, Manchuria telah masuk ke dalam wilayah kekuasaan pemerintah Nasional Cina, dan *kedua*: kekuatan Partai Komunis Cina telah dapat dipatahkan untuk sementara.

Sejak kekalahan itu PKC bergerak di bawah tanah kembali. Dari pengalaman pahit tersebut, Mao Zedong dan Zhu De kemudian mengembangkan pasukan buruh dan tani menjadi Tentara Merah gaya baru, dan melancarkan strategi perang gerilya, dengan pedesaan sebagai *base camp* nya. Strategi baru yang dilancarkan PKC menambah kekuatan Tentara Merah dan semakin

masa pengorganisasian yang sulit (1928-1933), Mao Zedong berhasil mendirikan sebuah partai dengan anggota sekitar 300.000 orang dan pasukan Tentara Merah untuk melawan Partai Kuomintang pimpinan Chiang.

Namun kekuatan pasukan Tentara Merah pada saat itu bukanlah lawan yang tangguh bagi pasukan Kuomintang. Pada tahun 1933, pasukan Tentara Merah kembali mengalami kekalahan yang cukup telak. Untuk menghindari jumlah korban yang semakin banyak, Mao dan para pengikutnya yang selamat melakukan perjalanan ke arah barat melalui daerah pegunungan dan pedesaan yang medannya sulit dijangka oleh tank, artileri, dan pesawat terbang pihak Kuomintang. Perjalanan yang memakan waktu sekitar 1 tahun tersebut kemudian dikenal dengan istilah "Hijrah Akbar" (*The Long March*).

Dalam perjalanan dimana pasukan Tentara Merah jauh dari pengaruh Partai Komunis Soviet, PKC mengadakan sidang Biro Politik di Zun Yi dan menghasilkan kebijakan partai yang tidak mengikuti semua perintah dari aliran Partai Komunis Soviet. Maka kepemimpinan PKC mulai bergeser dari tangan penasihat asosiasi partai Komunis Soviet ke tangan 4 sekawan pimpinan gerilyawan : Mao Zedong, Zhu De, Peng De Huai, Liu Bo Cheng.⁶

Pada tahun 1931, Jepang mulai menginvasi Cina yang sedang bergejolak. Dan sejak pertengahan tahun 1935, kaum militeris di Jepang menjadi semakin besar pengaruhnya terhadap penentuan politik luar negeri Jepang. Hal ini sudah dapat dipastikan akan adanya politik ekspansionis di Asia. Hal ini dibuktikan

⁶ WD. Sukiman, *Sainark China Kont*

dengan direbutnya Manchuria dan Mongolia Dalam dari wilayah Republik Nasionalis Cina.

Kegagalan Chiang Kai-shek dalam mencegah ekspansi Jepang tersebut mendapat kecaman keras dari masyarakat Cina pada umumnya. Slogan: "hentikan pertikaian di antara sesama bangsa Cina dan lawanlah agresi Jepang", terus didengungkan sampai pada peristiwa penculikan terhadap Chiang Kai-shek di Xi An (Desember 1936) oleh 2 panglima tentara Nasional., yang sebelumnya telah mendukung ajakan Mao Zedong untuk membentuk front Persatuan Anti-Jepang.

Sebagai kelanjutan dari peristiwa tersebut, maka telah disepakati oleh Kuomintang dan PKC bahwa segenap pemerintahan Komunis Cina di daerah-daerah di lebur ke dalam instansi-instansi pemerintah Nasionalis setempat. Dan Tentara Merah diletakkan di bawah komando Tentara Nasionalis dengan Chiang Kai-shek sebagai panglima tertingginya. Dari pertengahan tahun 1930 sampai dengan pertengahan tahun 1940, konflik internal antara Kuomintang dan Komunis Cina untuk sementara ditunda karena adanya ekspansi Jepang ke wilayah Cina.

Perang Cina-Jepang tidak terlepas dari pengaruh perkembangan politik internasional yang pada saat itu sedang terjadi perang dunia II (PD II) dalam PD II, yang mulai meletus pada akhir tahun 1941, terdapat 2 kekuatan inti yang saling berhadapan :

1. Jerman, Itali, dan Jepang sebagai negara-negara poros; dan
2. Inggris, Perancis dan AS sebagai negara-negara sekutu.

Secara tidak langsung dengan melihat 2 kekuatan tersebut, pemerintah Nasionalis Cina berhibak pada negara-negara sekutu. Sehingga bantuan senjata

dan personil dari negara-negara sekutu mengalir kepada pemerintah Nasionalis Cina dan menempatkan Tentara Merah pada kedudukan sebagai “anak tiri”, karena tidak memperoleh bagian apapun dari bantuan-bantuan tersebut. Dari sini gejala-gejala keretakan Front Persatuan Anti-Jepang mulai terlihat.

Di lain pihak, selama aliansi di tahun 1937-1945, Mao tetap mengontrol Tentara Merah dan daerah-daerah yang sudah di bebaskan. Penduduk yang di bawah komando Tentara Merah jumlahnya meningkat dari 2 juta menjadi 95 juta, begitu juga dengan pasukan Merah jumlahnya meningkat dari 30.000 menjadi mendekati angka 1 juta orang.⁷

Saat periode awal aliansi dengan KMT, PKC menikmati membesarnya ruang untuk beroperasi dikota-kota dan banyak aktivis yang mendekam dalam penjara dibebaskan. Dan menjelang kekalahan Jepang dalam PD II, Front Persatuan Anti-Jepang cenderung berkembang kearah konfrontasi 2 kekuatan politik dan militer di Cina, yaitu: KMT dengan Tentara Nasional di satu pihak, dan PKC dengan Tentara Merah di pihak yang lain.⁸

Pada akhir tahun 1944, keperkasaan Nazi Jerman mulai menurun, disusul dengan kekalahan Jepang atas sekutu pada tahun 1945. Pada saat itu, PKC menjadi partai panutan bagi pejuang PKC menguasai 19 daerah yang sudah dibebaskan yang berpenduduk 95 juta orang, mengorganisir tentara yang berkekuatan 910.000 orang, sebuah milisi yang beranggotakan 2,22 juta orang dan

⁷ www.24brinkster.com, op.cit

⁸ Perkembangan selanjutnya menunjukkan bahwa Pemerintah Nasional Cina yang dilanda korupsi semakin menurun semangat juangnya dan citranya di mata rakyat cina pun menjadi sangat rendah. Sebaliknya, PKC yang bergerak di tenagh-tengah rakyat pedesaan, dan Tentara Merah yang justru mengendalikan perjuangannya pada basis sama dengan selaut jelata, mendukung

SDU (Self Defence Unit, semacam laskar untuk pertahanan) yang mempunyai anggota sebesar 10 juta orang.

Kejenuhan akan perang dan dominasi Imperialis, membuat mayoritas rakyat Cina berharap agar PKC dan KMT bisa bekerja sama untuk perdamaian. Tapi, dengan bekingan imperialis, terutama AS, KMT tetap berpendirian agar PKC berada dibawah komandonya. Kekuatan sekutu memerintahkan Jepang untuk menyerah hanya pada KMT, yang kemudian KMT mendapatkan bantuan militer dan dana dari AS jumlahnya sangat besar.

Sebuah perjanjian damai antara PKC dan KMT terjadi di tahun 1946, yang beberapa bulan kemudian dilanggar oleh KMT, dengan bantuan militer AS, dan membawa Cina pada perang saudara yang habis-habisan. AS tidak merahasiakan sikapnya "yang membantu kubu Nasionalis (KMT)". Walaupun KMT sendiri agak malu-malu dengan tujuan strategi mereka "untuk menghancurkan para bandit-bandit Komunis".

Tapi hati dan pikiran jutaan orang Cina telah tertambat pada para bandit Komunis ini. Tahun 1946, semua wilayah yang terbebaskan meluas, satu program reformasi agraria dilaksanakan, sewa tanah dan pembagian keuntungan bagi tuan tanah direksi (dihilangkan), tanah dibagi-bagikan kepada para petani miskin, pajak bagi tuan tanah diperbesar. Pada berbagai daerah yang di bawah kontrol KMT, ketika orang-orang kaya sedang mengeruk keuntungan dari praktek-praktek yang gila-gilaan, mayoritas rakyat sedang mengalami penderitaan yang sangat berat dikarenakan inflasi yang merajalela.

pemerintahan Chiang. Hal itu menyebabkan meningkatnya represi dan wajib militer terhadap rakyat.

Protes-protes Massa menjalar di daerah-daerah kekuasaan KMT di akhir 1946-an, pada bulan terakhir 500.000 pemuda di Beijing memprotes pemerkosaan terhadap seorang pelajar yang dilakukan oleh serdadu AS. Para pelajar dan mahasiswa di Shanghai memprotes perang saudara, harga yang melambung tinggi dan tindakan para spekulan, kemudian aksi-aksi ini meluas ke kota-kota lain seperti Beijing, Nanjin dan Mukden.

Chiang kemudian bereaksi keras dengan menangkap para pelajar dan mahasiswa sebanyak 13.000 orang dalam waktu dua bulan, tetapi gelombang protes lainnya menyusul dan meledak di tahun 1947. Para buruh juga ikut serta di banyak kota, terutama di Shanghai, dimana terjadi pemogokan dan kerusuhan yang disebabkan melambungnya biaya hidup dan adanya bencana kelaparan.

AS tetap setia untuk mengguyurkan pinjaman, bantuan militer dan bantuan lainnya pada rezim yang dibenci ini. Para penasehat dari AS mempunyai kontrol yang sangat penting terhadap tentara KMT, polisi, dan angkatan laut, dan juga ekonomi dan finansial diseluruh negeri Cina. Tahun 1946, AS mencatat 51% ekspor dari Cina dan impor Cina dari AS sebesar 57%.⁹ Kekuatan bersenjata AS sangat kuat, tapi mereka tidak mampu menahan pembusukan politis dan moral rezim Chiang. Sebaliknya, dukungan moral dan politis terhadap PKC semakin menguat.

⁹ <https://www.nytimes.com/1946/03/11/1946-03-11/1946-03-11>

Selama 1946-1947, PKC menghancurkan 25% dari tentara KMT, dan secara bersamaan kekuatan bersenjata PKC berkembang sampai mendekati angka 2 juta. Bulan juni 1948 Tentara Merah jumlah anggotanya mendekati angka 3 juta orang dan PKC menguasai wilayah yang berpenduduk 168 juta orang. Banyak orang yang meninggalkan wilayah KMT untuk masuk ke wilayah Merah atau bisa disebut Cina Baru.

Chiang mengadakan serangan militernya yang terakhir pada Januari 1949, dan kemudian mereka mengungsikan modal pertamanya dari Nanjing ke Guangzhou, kemudian ke Chongqing. Chengdu dan terakhir ke Taiwan, dan mendirikan suatu kekuatan baru yang lebih kecil di bawah perlindungan AS,¹⁰ pasukan Jiang membawa lari banyak harta rampasan, persediaan emas dan benda-benda bersejarah Cina.

Setelah kota Nan King, ibu kota pemerintah Nasionalis Cina, berhasil dikuasai dan separuh dari wilayah Cina berada ditangan kekuasaan PKC, maka Mao Zedong mulai mempersiapkan pembentukan suatu negara Cina sebagaimana dicita-citakan oleh PKC. Pertama-tama diambil prakarsa untuk membentuk panitia persiapan Majelis Permusyawaratan politik, dengan Mao Zedong sebagai ketuanya. Dan berdasarkan keputusan Majelis permusyawaratan politik Rakyat Cina dalam sidang yang diselenggarakan antara tanggal 21-30 September 1949, berdirilah Republik Rakyat Cina (RRC) yang diproklamasikan oleh ketua Majelis Permusyawaratan Politik Rakyat Cina, Mao Zedong pada tanggal 1 Oktober 1949.

¹⁰ Pada masa awal berkuasanya pemerintah Nasional di Taiwan, AS pada saat itu sedang menjalankan strategi Perang Dingin (mlai 1947) "*isolation and Containment of communism*" dari Presiden Harry Truman. Sedangkan AS mengirimkan pasukan dan delegasinya ke Taiwan dalam rangka melindungi Taiwan dari serangan PKC

2. Masa Pemerintahan Republik Rakyat Cina (Mao Zedong)

Dominasi dunia di Cina dapat dikatakan telah berakhir setelah kemenangan PKC dalam Perang saudara, yang ditandai dengan berdirinya RRC, 1 Oktober 1949. Sejak berdirinya RRC maka Daratan Cina terdapat 2 lembaga induk politik yaitu: (1) Negara Republik Rakyat Cina (RRC), dan (2) Partai Komunis Cina (PKC).¹¹

Sebagaimana lazimnya sebuah negara baru, maka RRC mencurahkan perhatiannya pada keutuhan wilayah, konsolidasi kekuasaan, dan pencegahan terhadap pengaruh dari luar. Dalam usahanya menanggulangi bahaya dari luar, RRC pertama-tama mengadakan pendekatan dengan Uni Soviet. Selain merupakan negara tetangga terdekat, RRC dan Uni Soviet sama-sama berazaskan Marxisme-Leninisme, meskipun dalam PKC terdapat tambahan pemikiran dari Mao Zedong.

Berhubungan dengan Uni Soviet di awal-awal pemerintahan Mao Zedong, RRC untuk sementara merasa aman dari ancaman bahaya luar negeri. Untuk selanjutnya, Mao Zedong mulai mencurahkan perhatiannya kembali pada penertiban dan pengembangan dalam negerinya. Berbeda dengan sistem kekuasaan RRC didasarkan pada persekutuan antara kaum buruh, tani, maka kekuasaan RRC didasarkan pada persekutuan antara kaum buruh, tani, borjuis nasional, dan borjuis kecil di bawah pimpinan puncak PKC.¹²

Langkah penertiban yang pertama yang dilakukan RRC adalah terdapat penggunaan tanah. Tanggal 28 Juni 1950, dikeluarkan hukum Penertiban Tanah

¹¹ WD. Sukisman, *Sejarah Cina Kontemporer Jilid 2*, PT Pustaka Paramita, Jakarta, 1993, hal. 47.

(*Land Reform Law*). Semua lahan milik tuan tanah disita oleh negara untuk dibagikan secara merata kepada petani penggarap tanah. Peristiwa yang kemudian lebih dikenal dengan Revolusi Agraria ini menelan korban beberapa juta manusia, dan berlangsung dari Juni 1950 sampai Desember 1952.

Dalam waktu yang sama, pada tanggal 29 Desember 1951. dalam rangka penertiban dalam negeri pemerintah RRC melancarkan Tiga Gerakan besar-besaran pada hakikatnya adalah pembersihan terhadap musuh-musuh komunisme di tengah-tengah masyarakat yaitu :

1. Gerakan 3 Anti, yaitu pemberantasan terhadap korupsi, birokratisme, dan pemborosan.
2. Gerakan 5 Anti, yaitu pemberantasan terhadap penyuapan, manipulasi pajak, penyalahgunaan barang milik negara, dan pembocoran rahasia negara.
3. Dikeluarkannya Undang-undang perkawinan, yang memberi persamaan hak antara wanita mengenai perkawinan, perceraian, dan hak milik.

Walaupun telah memakan korban jiwa yang tidak sedikit, pemerintahan Mao berhasil mencapai kestabilan politik dan keamanan dalam negeri RRC. Hal ini yang kemudian memungkinkan dilancarkannya rencana perkembangan lima tahun pertama., dan juga memberikan kemungkinan untuk mengembangkan politik luar negeri yang bernada perdamaian dan persahabatan antar bangsa yang kemudian dinamakan politik hidup berdampingan secara damai (*Peaceful coexistence*)¹³

¹³ Lihat lebih lanjut di W.D. Sulaiman, op.cit. hal. 55-62

Selama tahun 1954 dan 1955, RRC telah melakukan beberapa tindakan-tindakan yang fundamental, yaitu: diresmikannya Undang-undang Dasar Nasional dan dibentuknya Kongres Rakyat Nasional, serta dianutnya politik luar negeri hidup berdampingan secara damai, yang kemudian diterapkan dalam konferensi Asia-Afrika di Bandung maupun dalam Konferensi Perdamaian mengenai perang Korea dan Perang Vietnam, yang kemudian hal tersebut mengangkat derajat RRC ke peringkat yang cukup tinggi dalam kehidupan antar bangsa-bangsa di dunia.

Di tengah-tengah keberhasilan pemerintah Mao, beberapa sarjana RRC mengeluhkan kebijaksanaan PKC yang lebih mengutamakan pembangunan di bidang politik yang telah banyak memakan korban jiwa, daripada pembangunan di bidang ilmu pengetahuan.

Pemerintahan Mao melancarkan prosedur standar dalam menanggulangi ancaman dari musuh-musuh komunisme itu, yaitu dengan menyingkirkannya secara perlahan-lahan. Langkah *pertama*, diawali dengan Gerakan Seratus Bunga Berkembang, dimanan kaum cendekiawan diberikan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, sehingga bermunculan kritik dan kecaman terhadap pemerintah RRC pada umumnya dan PKC pada khususnya.

Langkah *kedua*, setelah bermunculan para cendekiawan yang mengkritik pemerintah, dilancarkan Gerakan Rektifikasi/penertiban cara kerja, dimana seluruh rakyat massa dan organisasi di bagi-bagi menjadi kelompok-kelompok kecil yang masing-masing kelompok tersebut dipimpin oleh seorang kader Komunis., yang kemudian terjadilah penangkapan secara besar-besaran terhadap kaum cendekiawan yang dianggap sebagai musuh musuh Komunis. Sehingga

kritikan dan kecaman yang ditujukan kepada pemerintah dan PKC lambat laun mulai mengendur.

Belum puas dengan keberhasilannya menanggulangi gangguan keamanan dari dalam negeri, pemerintahan Mao melancarkan program selanjutnya yaitu Gerakan jauh ke depan dalam rangka meningkatkan ekonomi. Kegagalan loncatan jauh ke depan membuat Mao mengundurkan diri dari kursi Presiden RRC, tapi kedudukannya sebagai PKC tetap dipegangnya.

Kemudian mulai bermunculan beberapa tokoh pimpinan baru RRC yang beraliran pragmatisme.¹⁴ Keberhasilan para pimpinan RRC yang beraliran pragmatisme dalam memulihkan perekonomian pasca Gerakan Loncatan Jauh ke Depan, mendapatkan simpati dari rakyat. Hal ini membuat pengaruh Mao Zedong mulai berkurang.

Dalam rangka menyingkirkan lawan-lawan politiknya tersebut. Mao meresmikan program baru, yaitu "Revolusi Kebudayaan",¹⁵ yang diketuai oleh Chen Boda, dengan tujuan utamanya adalah menyingkirkan para penguasa RRC pada saat itu yang telah beralih ke aliran pragmatisme. Kemudian muncullah Empat Serangkai (*Gang of Four*), sebagai pendukung kuat Mao Zedong sebagai pimpinan besar Revolusi Kebudayaan.

Setelah Revolusi Kebudayaan berakhir (1969), beberapa tahun kemudian terjadi makar oleh menteri pertahanan, Marsekal Lin Biao, yang pada saat itu menduduki posisi sebagai ahli waris dari pimpinan besar PKC, Mao Zedong.

¹⁴ Para pemimpin RRC yang beraliran pragmatis dianggap telah membelot dari jalan Komunis ke jalan Kapitalis. Beberapa tokoh tersebut adalah: 1) Presiden RRC, Liu Shaoqi, 2) PM RRC, Zhou Enlai, 3) Sekjen PKC, Deng Xiaoping, dan 4) Kepala staf Tentara Pembebasan Rakyat, Lo Ruiqing.

¹⁵ M.D. Subiawan, *Sejarah China Kontemporer*, Jilid 2, Pustaka Pagarita, Jakarta, 1992, hal. 91-99.

Namun upaya makar tersebut berhasil digagalkan setelah salah satu anak buah Lin Biao membocorkan rencana makar tersebut. Lin Biao sendiri akhirnya tewas dalam kecelakaan pesawat ketika hendak melarikan diri ke Uni Soviet (13 September 1971).

Dari peristiwa-peristiwa dalam negeri RRC yang banyak memakan korban tersebut, ada kecenderungan dari Mao Zedong untuk memperbaiki ekonomi dan politiknya, dan berusaha menggalang persahabatan internasional terutama untuk menghadapi tekanan dari Uni Soviet, yang pada saat itu sedang bermusuhan dengan RRC.

Pada awal 1970, Presiden AS, Richard Nixon, memanfaatkan konflik yang terjadi antara RRC-Uni Soviet tersebut, dengan menyatakan kehendaknya untuk menarik tentara AS dari Vietman dan disusul dengan pernyataan bahwa “masalah-masalah besar Asia tidak akan dapat diselesaikan tanpa diikuti sertakannya RRC”.¹⁶

Perkembangan kedekatan hubungan antara RRC-AS berjalan sedemikian cepat, sehingga membawa pengaruh pula terhadap sidang umum PBB bulan Oktober 1971, yang pada kesempatan itu RRC diakui oleh PBB sebagai negara sah yang berkuasa di Cina dan diberi hak untuk menjadi anggota PBB, menggantikan kedudukan Republik Nasionalis Cina di Dewan Keamanan PBB dan sekaligus sebagai salah satu negara pemegang hak veto. Sedangkan Republik Nasionalis Cina yang berdasarkan sejarah merupakan negara republik yang

pertama di Asia, yang sejak berdirinya PBB termasuk salah satu warga Empat Besar, pada saat itu juga keluar dari pentas organisasi dunia tersebut.

Kunjungan Presiden Nixon ke RRC (1 februari 1972) merupakan salah satu tonggak sejarah bagi diplomasi RRC. Sebab dari kunjungan tersebut menghasilkan pernyataan bersama RRC-AS, yang kemudian lebih dikenal dengan "Komunike Shanghai".¹⁷ Dan sebagai tindak lanjut dari kunjungan Nixon tersebut, RRC memulihkan hubungan dagangnya dengan negara-negara Eropa Barat dan Jepang.

Selama masa 1973-1975, di jajaran elit PKC terjadi persaingan kuat antara aliran pragmatis dan aliran dogmatis. Pada Kongres PKC X (Agustus 1973), jajaran Dewan Biro Politik sebagai pemegang kekuasaan sehari-hari PKC terbagi 2 golongan yang seimbang, yaitu 4 orang dari aliran pragmatis (terdiri atas : Marsekal Zhu de, Marsekal Ye Jianying, Zhou Enlai, dan Deng Xiaoping, semuanya dari angkatan Long March); dan 4 orang dari penganut dogmatis radikal (terdiri atas : Wang Hongwen, Chang Qun Qiao, Li desheng, dan Kang Sheng, yang semuanya termasuk aktivis dari revolusi kebudayaan).

Untuk beberapa tahun, aliran pragmatis berada sedikit di atas angin sebab di bawah kepemimpinan PM Zhou Enlai, RRC berhasil meraih sasaran-sasaran programnya yang memuaskan di bidang politik, ekonomi dan diplomatik.

Namun ketika PM Zhou Enlai meninggal dunia pada usia 78 tahun (8 Januari 1976), maka dogmatis kembali memegang kendali pemerintahan RRC. Hal ini terbukti dengan ditunjuknya Hui guofeng, dari aliran dogmatis, sebagai

¹⁷ Walter S. Janes, *Logika Hubungan Internasional, Persepsi Nasional I*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992, hal. 185-186

pejabat sementara PM RRC (14 Februari 1976). Padahal dari segi senioritas maupun pengalaman, Deng Xiaoping jelas lebih unggul dibanding Hua Guofeng.

Aliran pragmatis kembali mendapat pukulan berat dengan dibebaskannya Deng Xiaoping dari segala jabatannya, baik di PKC maupun di pemerintahan RRC, dan dikenakan sanksi hukuman “turun ke bawah” untuk merombak mental melalui kerja bakti di Canton, di bawah pengawasan panglima Militer, Xu Shiyu. Disusul kemudian dengan meninggalnya salah satu tokoh panutan di aliran progmatik, Marsekal Zhu De, tanggal 8 Juli 1976.

Sementara itu di tengah-tengah kemenangan aliran dogmatis, pada tanggal 9 september 1976, pemimpin Besar RRC sekaligus ketua PKC, Mao Zedong meninggal dunia. Hal ini membuat kekuatan aliran dogmatis limbung, bahkan sampai terjadi perselisihan tentang pengganti Mao Zedong, sebagai ketua PKC, antara Huan Guofeng yang didukung oleh Menteri pertahanan, Ye Jianying, dan panglima Daerah Militer di Beijing, Wang Dongxiang dan Jiang Qing, janda Mao Zedong dengan Empat serangkainya. Yang pada akhirnya Hua Guoafeng atas dukungan dari Marsekal Ye Jianying dan Wang Dongxing, menangkap Empat Serangkai (6 Oktober 1976).

Sepeninggal Mao Zedong dan Empat Serangkai, membuat pendukung aliran pragmatis melakukan demonstrasi besar-besaran di lapangan Tiananmen pada bulan Januari 1977 dan mengajukan tuntutan untuk membatalkan segala hukuman dan kutukan terhadap Deng Xiaoping, dan merehabilitasikannya ke semua jabatannya. Dengan posisi yang terjepit itu, akhirnya Hua Guofeng mengabdikan tuntutan tersebut. Dan dengan demikian Deng Xiaoping muncul

kembali di pentas kepemimpinan PKC dan pemerintah RRC untuk ke 3 kalinya. Sehingga muncul pucuk pimpinan PKC dan pemerintah RRC yang berupa Segitiga: Hua Guofeng, Deng Xiaoping, dan Ye Jianying.

Pada Sidang II Komite Sentral PKC XI (Desember 1978) berhasil menyepakati kebijakan untuk membatalkan semua keputusan yang menghukum mereka yang dituduh terlibat dalam peristiwa Tiananmen 1976, dan merehabilitasi mereka pada jabatannya semula. Sebaliknya Kelompok Empat Serangkai secara resmi dikeluarkan dari PKC. Dan keputusan yang terakhir adalah pernyataan bahwa Revolusi kebudayaan telah berakhir dan segala upaya akan dipusatkan pada pelaksanaan Modernisasi Sosialis, yang lebih dikenal dengan Modernisasi 4 bidang. Dimulai tahun 1979.¹⁸ maka Sidang III Komite Sentral PKC XI bulan Desember itu merupakan titik awal dari proses peralihan dari era dogmatisme ke era pragmatisme dan sekaligus merupakan awal dari era kepemimpinan Deng Xiaoping.

Pada sidang VI Komite Sentral XI (Juni 1981), Hua Guofeng mengundurkan diri dari kedudukannya sebagai Ketua Komite Sentral PKC untuk digantikan Hu Yaobang, sedangkan kedudukannya sebagai ketua komisi Militer, digantikan oleh Zhao Ziyang. Dengan demikian muncullah Segitiga II: Deng Xiaoping, Hua Yaobang Zhao Ziyang.¹⁹

¹⁸ Oleh karena modernisasi tersebut meliputi 4 bidang, yaitu: 1) Pertanian, 2) Industri, 3) Pertahanan Nasional, dan 4) Ilmu Pengetahuan dan teknologi, maka kebijakan tersebut kemudian dikena dengan "Modernisasi 4 Bidang".

¹⁹ Apabila Sidang Pleno III Komite Sentral PKC XI (Desember 1978) merupakan awal proses peralihan dari era dogmatisme ke era pragmatisme, maka Sidang Pleno VI Komite Sentral PKC XI (Juni 1981) merupakan titik awal dari pelaksanaan pragmatisme.

B. Dinamika Politik Cina Daratan-Taiwan

Revolusi 1949 memunculkan “dua Cina”. RRC dan Taiwan, yang masing-masing pihak mengaku sebagai pemerintahan sah dari Cina. Hubungan keduanya selalu mengalami pasang surut, terutama apabila dikaitkan dengan upaya reunifikasi, karena adanya perbedaan persepsi di antara para pemimpin RRC dan Taiwan. Dalam sub bab ini memfokuskan pembahasan tentang kebijakan-kebijakan masa pemerintahan Jiang Zemin dan Lee Teng-hui

1. Masa Pemerintahan Jiang Zemin

Jiang Zemin terpilih sebagai Presiden Cina pada bulan Maret 1993, dan menjadi ketua Komisi Sentral Militer (CMC) PKC. Pada pemilihan Presiden tahun 1993, Jiang Zemin terpilih lagi hingga tahun 2003 dan tetap memegang jabatan sebagai ketua Komisi Sentral Militer (CMC) PKC..

Pada Januari 1995, Jiang Zemin menyampaikan proposal delapan poin tentang reunifikasi antara Taiwan dan Cina daratan, yaitu :

1. Setia terhadap prinsip satu Cina
2. Menentang dua Cina, atau satu Cina, satu Taiwan
3. Melakukan negosiasi dalam kedudukan yang sederajat untuk mencapai kesepakatan secara resmi dalam menyelesaikan pertikaian di kedua sisi selat Taiwan.
4. Cina tidak akan menyerang Cina.
5. Meningkatkan pertukaran dan kerjasama ekonomi di kedua sisi selat Taiwan

6. Memajukan tradisi kebudayaan Cina
7. Semua partai dan tokoh-tokoh Taiwan boleh melakukan pertukaran pandangan dengan Cina daratan dalam hubungan antara kedua selat.
8. Kunjungan kedua sisi Taiwan akan dilakukan. Urusan dalam negeri Cina akan diselesaikan oleh Cina sendiri.²⁰

Proposal yang memuat delapan poin diatas pada dasarnya mengundang pihak Taiwan untuk melakukan negosiasi tentang reunifikasi. Presiden Jiang Zemin tetap menekankan prinsip satu Cina dengan mengusulkan tentang persamaan politik dan bukan kedaulatan Taiwan.

Agenda politik luar negeri yang di jalankan Jiang Zemin, seperti misalnya dialog dengan pemimpin-pemimpin barat, merupakan upaya Jiang dalam menjalin hubungan bilateral. Pada tahun 1998, Jiang mengadakan debat langsung di televise Beijing dengan presiden Amerika Serikat, Bill Clinton

Pada dasarnya kebijakan dalam negeri Jiang Zemin terhadap Taiwan mengikuti isu yang tengah berkembang di kedua sisi selat Taiwan. Perkembangan selanjutnya, Dewan Negara (Kabinet Cina) pada awal tahun 2000 memberikan peringatan keras terhadap Taiwan yang tertuang dalam "Kertas Putih" berisi 11.000 kata, dan secara eksplisit menegaskan bahwa Taipei akan menghadapi kemungkinan perang jika kembali menolak upaya reunifikasi melalui meja perundingan. Artinya, pemerintah Cina daratan masih menghendaki siapa saja yang memimpin Taiwan untuk membuat komitmen untuk meneruskan proses reunifikasi.

²⁰ Sheng Lien, *China's Dilemma the Taiwan Issue*, Institute of Southeast Asian Studies

Agenda politik dalam negeri Jiang adalah menyelesaikan persoalan Taiwan melalui reunifikasi damai. Dalam laporannya di depan Konggres Nasional ke-16 Partai Komunis Tiongkok, Jiang berusaha untuk memperjuangkan penyatuan kembali secara damai dan bertekad untuk mengubah upaya separatistis. Jiang memperbolehkan Taiwan mempertahankan sistem masyarakat dan cara hidupnya setelah penyatuan kembali Taiwan sesuai dengan prinsip satu Negara, dua sistem.

Pada tanggal 30 Januari, presiden Cina Jiang Zemin atas nama Partai Komunis Cina dan pemerintah Cina telah membuat pidato yang sistematis penting mengenai penyelesaian masalah Taiwan. Pidato tersebut telah menguraikan intisari dari ide Deng Xiaoping tentang reunifikasi secara damai di bawah formula “satu Negara dua sistem” dan secara obyektif menganalisa situasi yang di hadapi dalam penyelesaian masalah Taiwan, serta mengajukan delapan usulan mengenai proses pengembangan lebih lanjut hubungan kedua tepi selat dan reunifikasi tanah air secara damai.²¹

Konsep “satu Negara dua sistem” ini menjanjikan Taiwan sebagai wilayah administrative khusus dari wilayah Cina yang dipersatukan, Taiwan dibolehkan untuk memelihara cirri atau sifat kebebasannya dan sistem yang dianutnya sendiri, yang berbeda dengan Cina daratan. Dibawah “satu Negara dua sistem” ini, sosialisme di daratan dan kapitalisme di Taiwan akan saling berdampingan satu sama lain. Taiwan di jamin akan memiliki hak otonomi yang tinggi, yang meliputi kekuasaan administrasi dan legislative yang mandiri

²¹ <http://www.arifin-tj.com/kuiper?id=10065&jenis=internasional>

Cina senantiasa berpegang teguh pada pendirian reunifikasi tanah air secara damai, tetapi tidak pernah berjanji untuk melepaskan penggunaan kekerasan. Cina mengancam akan merebut pulau yang dianggap Cina sebagai pulau yang diduduki pemberontak dengan kekerasan itu, bila mereka memilih mau merdeka karena militer Cina tidak akan membiarkan setiap inci dari bagian wilayah Cina memisahkan diri. Cina pasti akan menggunakan kekerasan apabila mengalami banyak hambatan dalam mencapai tujuan utamanya untuk menyatukan kembali Taiwan ke dalam pangkuannya.

Cina akan melibatkan pasukannya dalam masalah Taiwan, Yang di maksudkan untuk mewaspadaai kecenderungan peningkatan jumlah kelompok separtaris dan aktivitas pasukan untuk memerdekakan Taiwan sejak beberapa tahun terakhir.

2. Masa Pemerintahan Lee Teng-hui

Sejak kekalahan yang dideritanya dalam perang saudara, Republik Nasionalis Cina dengan bantuan AS mulai mendirikan "Pemerintahan Cina tandingan" bagi RRC, di Taiwan. Di bawah kepemimpinan Chiang Kai-shek. Kaum Nasionalis di Taiwan menegaskan bahwa tujuan utama mereka adalah merebut kembali kekuasaan Cina yang ada di Daratan. Keluarnya pemerintah Nasionalis di Taiwan menegaskan bahwa tujuan utama mereka adalah merebut kembali kekuasaan Cina yang ada di Daratan. Keluarnya pemerintah Nasionalis Cina dari DRB (25 Oktober 1971) menandakan sebagian besar Negara di dunia

mengakui kekuasaan RRC, termasuk AS, dan membuat kemungkinan direbutnya kembali Cina daratan menjadi semakin kecil.

Meninggalnya Chiang Kai-shek pada tanggal 5 April 1975, membuat pemerintah Taiwan semakin jauh dari apa yang di cita-citakannya. Anak dari Chiang Kai-shek, **Chiang Ching-kuo**, terpilih sebagai Presiden Taiwan pada pertemuan Nasional tanggal 21 Maret 1978, dan dikukuhkan sebagai Ketua KMT pada Kongres Nasional ke-12, tanggal 2 April 1981, di Taipei. Kebanyakan kebijakan yang diambil oleh pemerintahan Chiang Ching-kuo mengadopsi kebijakan-kebijakan yang dulu dianut oleh Chiang Kai-shek.

Diawal pemerintahannya, Presiden Chiang Ching-kuo mengutuk keras keputusan AS yang mengakui bahwa semua orang Cina yang tinggal di kedua sisi selat Taiwan adalah bagian dari RRC (Komunike Shanghai 1972), yang kemudian disusul dengan Komunike Bersama Pembukaan Hubungan Diplomatik (1 Januari 1979).

13 Januari 1988, secara mendadak Presiden Chiang Ching-kuo meninggal dunia, dan kedudukannya diambil alih oleh wakilnya, Lee Teng-hui, sampai dengan akhir periode kepemimpinan tahun 1990. Sebagai pemimpin baru di Taiwan, pemerintah Cina daratan berharap kepada Lee Teng-hui untuk melanjutkan proses reunifikasi antara Taiwan dan pemerintah Cina daratan. Status quo yang berlangsung selama puluhan tahun tersebut menuntut pemimpin Taiwan dan pemimpin Cina daratan untuk terus melakukan negosiasi dan perundingan.

Di akhir 1980-an, Lee Teng-hui memproklamirkan tentang "*one China is the supreme principle*" yang artinya bahwa satu Cina adalah prinsip tertinggi

Pada 23 februari 1988, Lee masih menyatakan bahwa “*one China Policy, not a two China policy*”. Tetapi pada tahun 1990, Lee mengemukakan gagasan tentang “*One China, two government*”, yang diartikan Lee sebagai “*one country, two governments*”. Pernyataan Lee ini merupakan fakta yang terjadi di Taiwan. Dalam garis pedoman unifikasi nasional pada 1991. Taiwan menyatakan bahwa hanya ada satu Cina. Tetapi untuk pertama kalinya, Taiwan memperkenalkan tentang “*one China, two equal political entities*”.²² Selanjutnya, pemerintah Cina daratan dan Taiwan mencapai consensus lokal dengan menggunakan prinsip satu Cina dalam pertemuan antara *Association for Relations Across the Taiwan Strait* dan *The Strait Exchange Foundation*²³ pada bulan Maret 1992. prinsip tersebut menerangkan tentang tiga pernyataan, yaitu :

1. Hanya ada satu Cina di dunia
2. Taiwan adalah bagian dari Cina
3. Cina dan Taiwan memiliki perbedaan, yaitu: untuk Beijing disebut *Peoples Republic of China* dan untuk Taiwan adalah *Republic of China*.

Taiwan kemudian mengklaim bahwa “dua sisi di selat Taiwan tidak menyetujui satu Cina”, dan menyepakati tentang satu Cina tetapi bebas menginterpretasikan. Cina menanggapi dengan tidak akan pernah menyetujui klaim Taiwan tentang hal tersebut.²⁴

Tahun 1993, posisi pemerintah Taiwan dalam kedaulatannya diubah menjadi satu Cina secara administrative berbeda, yaitu antara *Republic of China*

²² Sheng Lijun. op cit., p.99

²³ SEE adalah organisasi yang dibentuk oleh ...

dan *Peoples republic of China*. Taiwan secara tegas meminta kedaulatan eksklusif di seluruh Taiwan, kepulauan Penghu, Jinmen, dan Mazu. Melalui pertemuan APEC pada November 1993, Menteri Ekonomi Taiwan, Chiang Pin-kung, dan atas instruksi Lee Teng-hui, menyampaikan gagasan tentang transisi kebijakan utama dua Cina melalui unifikasi.

Kemudian di tahun 1994 terjadi banyak perubahan. Taiwan mengeluarkan "kertas putih" tentang hubungan di kedua sisi selat Taiwan. Dalam "kertas Putih" tersebut dinyatakan bahwa Taiwan dan pemerintah Cina harus secara lengkap mengetahui yurisdiksinya melalui teritorial masing-masing dan akan hidup berdampingan sebagai satu kesatuan secara legal dalam pentas internasional. Selanjutnya, Lee menitikberatkan pada prinsip hidup berdampingan antara keduanya, atau dengan kata lain ROC di Taiwan, dan PRC di Cina di daratan. Namun dalam perkembangannya, ada perubahan tentang prinsip tersebut, yang intinya Taiwan mengartikan secara tidak langsung kata legal tersebut sebagai kedaulatan. Pemerintah Cina daratan sendiri keberatan atas pernyataan Lee. Bagi Cina daratan pernyataan yang mengarah pada kedaulatan tersebut sama seperti yang diungkapkan oleh Chiang Kai-shek dan Chiang Ching-kuo. Pemerintah Cina daratan menganggap pernyataan Taiwan bertentangan dengan prinsip satu Cina. Sementara itu, Taiwan pernah meminta Cina daratan untuk merubah prinsip satu Cina karena sudah tidak relevan lagi. Menurut Taiwan, hanya konsep tentang kebudayaan dan kedaulatan yang akan membawa Taiwan dan pemerintah Cina memiliki persamaan di PBB

Dalam “kertas putih” yang dikeluarkan Taiwan menyatakan menolak menerima formula satu Cina dua sistem untuk reunifikasi. Sehingga pernyataan tentang Komunis Cina, satu Negara, dua sistem menjadi kesalahan terbesar dalam unifikasi Cina. Akan tetapi Taiwan mengemukakan formula reunifikasi menurut pengertian Taiwan sendiri, yaitu bahwa hanya demokrasi, kebebasan dan satu sistem persamaan dalam pembagian kesejahteraan yang dapat memecahkan problem Cina daratan dan Taiwan. Setelah menyatakan hal tersebut, Taiwan merubah ke posisi sebelumnya, yaitu pemerintah Cina daratan harus menghormati sistem demokrasi Taiwan dan mendengarkan demokrasi dan kebebasan di Cina sebagai pra kondisi satu sama lain untuk reunifikasi, seperti unifikasi demokrasi setelah tahun 1996, Taiwan menekankan bahwa unifikasi akan terjadi di masa depan jika Cina daratan menjadi Negara demokrasi seperti Taiwan berdasarkan prinsip “*one country, one good system*”.

Pada 8 April 1995, Lee menjawab proposal delapan poin yang diajukan oleh presiden Jiang Zemin melalui 6 poin, yaitu :

1. Kedua sisi selat Taiwan akan melanjutkan unifikasi berdasarkan pada realitas bahwa Taiwan dan Cina daratan adalah pemerintahan masing-masing melalui dua pemerintahan
2. Pertukaran bilateral berdasarkan pada kebudayaan Cina akan saling memperkuat.
3. Hubungan perdagangan dan ekonomi untuk menghasilkan manfaat satu sama

4. Kedua sisi selat Taiwan akan bergabung dalam organisasi internasional dalam kedudukan yang sama dan kedua pemimpin akan bertemu dalam situasi yang wajar.
5. Prinsip dalam menyelesaikan semua perselisihan melalui perdamaian dan harus ditaati.
6. Kedua sisi selat Taiwan akan bekerjasama dalam menjaga k emakmuran dan memajukan demokrasi di Hongkong dan Makao.²⁵

Di bawah kepemimpinan Lee Teng-hui, sistem politik Taiwan telah mengalami perubahan dan lebih demokratis. Perubahan terbesar yang dilakukan Lee Teng-hui, misalnya menciptakan sistem parlementer multi partai dan menghentikan kediktatoran Koumintang sebagai partai tunggal di Taiwan. Kebijakan-kebijakan ekonomi dan politik yang diambil ikut membawa perubahan besar bagi Taiwan. Kebijakan politik yang diambil Lee Teng-hui adalah *Xi He Policy (peace or avoid tension with China in its west)*. Kebijakan tersebut diambil dalam upaya mencegah ketegangan dan konfrontasi militer dengan Cina daratan serta mengedepankan diplomasi pragmatis untuk memperluas hubungan di lingkup internasional. Kebijakan Lee dapat diterima hingga kunjungan Lee ke Amerika Serikat pada tahun 1995, dan membuat Beijing meningkatkan kecurigaan terhadap posisi Lee dalam reunifikasi. Posisi Lee menjadi sulit, karena sebelum kunjungan Lee ke Amerika Serikat sejumlah pejabat Cina daratan memiliki untuk tidak ada ketegangan dalam pendekatan terhadap Taiwan

Di samping itu, Taiwan menunjukkan penolakan untuk melakukan diskusi dengan pemerintah Cina daratan tentang isu-isu politik yang berkaitan dengan masalah reunifikasi Taiwan tidak menghendaki reunifikasi sebelum Cina daratan menjadi Negara yang demokratis. Menghangatnya kembali hubungan Taiwan-Cina daratan membuat Taiwan menyusun prioritas nasionalnya, yaitu :

1. Melakukan pembaharuan kemampuan pertahanannya melalui penempatan berbagai persenjataan modern
2. Mempercepat pembangunan industri pertahanan sendiri
3. Melakukan pengadaan dari luar negeri
4. Menyelesaikan reorganisasi angkatan bersenjatanya pada tahun 2000

Prioritas nasional ini di tujukan untuk menghadapi serangan mendadak dan cepat yang dilakukan oleh kekuatan elit Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) Cina daratan. Sebagai bentuk antisipasi terhadap serangan PPRC Cina daratan. Taiwan telah melakukan reorganisasi besar-besaran atas kekuatan daratnya menjadi brigade gabungan yang lebih kecil dan kenyal, tetapi memiliki kemampuan daya tembak dan mobilitas yang lebih besar.

Penolakan Taiwan untuk melakukan reunifikasi melalui perundingan mengakibatkan ketegangan politik di kedua sisi selat Taiwan. Hingga di akhir kepemimpinan Lee pada tahun 2000, Taiwan dan pemerintah Cina daratan belum memperoleh kesepakatan tentang reunifikasi.

Semangat kemerdekaan Taiwan akan memperoleh momentum yang tepat, ketika Chen Shui-bian, dari Partai Progresif Demokrat yang berazaskan

2000. Proses demokratisasi di Taiwan memang sebenarnya sebuah generasi yang sama sekali berbeda ketika KMT berkuasa, sebuah generasi yang sama sekali tidak terkait dengan slogan politik “ satu Cina” dan cenderung mempertahankan status quo demi keamanan menghadapi ancaman PRC